

KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARIDA

Julaiha¹

ABSTRAK

Julaiha. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda di bawah bimbingan Dr. Anthonius Margono M.Si selaku pembimbing I dan Drs. M.Z. Arifin M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu library research, document research dan field work research (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penyimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda dari hasil perhitungan selama 3 (tiga) tahun rata-rata 1,17%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan kriteria interpretasi nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah masih relatif kecil pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudah atau dengan presentase rasio rata-rata yaitu sebesar 1,17% dengan kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Faktor penghambat kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email: junaidijulaiha@gmail.com

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya jumlah tenaga pegawai yang melakukan pendataan objek pajak, serta lemahnya sistem akurasi dan validitas database dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Sedangkan faktor pendukung berkembangnya teknologi dan komunikasi memudahkan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta kerja sama pihak Dinas Pendapatan Daerah dengan Bank Kaltim dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu bagian pajak daerah yang mempunyai peranan cukup penting dalam menunjang pendapatan asli daerah. Peranan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintahan daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah baik Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai akibat diserahkannya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sampai dengan Mei 2014 adalah 21,76 persen belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 78,24 persen. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam menangani masalah pajak bumi dan bangunan masih belum optimal, terbukti dengan masih ada banyak wajib pajak yang telat membayar pajak dari batas waktu yang ditentukan sehingga dikenakan denda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu: Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis
Sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menilai keberhasilan program kerja yang telah dilakukan.
2. Manfaat Teoritis
Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, terutama pada mata kuliah Administrasi Keuangan Negara dan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Untuk memahami lebih tentang arti Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD), dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli definisi dari APBD. Pengertian APBD menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Yani (2002: 369) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.1.1 Kontribusi

Ada berbagai macam mengenai batasan atau definisi kontribusi menurut para ahli. Berkaitan dengan hal itu dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian kontribusi itu sendiri.

Menurut Partanto (2001: 78) mendefinisikan kontribusi adalah uang atau iuran atau kepada perkumpulan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Nurmantu (2003: 5) menjelaskan kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam

menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu indikator penting kemandirian suatu daerah dalam membangun dan menjalankan semua urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah atasan adalah daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan daerah. Suatu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikaitkan ideal apabila sumber Pendapatan Asli Daerah menyumbang sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan subsidi.

Menurut Mardiasmo (2002: 132) yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.3 Pajak

Berbagai pengertian mengenai pajak yang dikemukakan dari para ahli atau ilmuwan yang bergerak di bidang perpajakan. Walaupun demikian pada prinsipnya definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk mempertegas pengertian pajak berikut akan dikemukakan pendapat dari Soemitro (dalam Mardiasmo, 2009: 1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum..

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang RI No. 28 Th. 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak daerah adalah pajak yang wewenangnya berada pada pemerintah daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Madya yang hasil pungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Wajib pajak pajak bumi dan bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina dan Suryo, 2006: 14).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. (Setiawati 2009: 711).

2.2 Definisi Konsepsional

Di dalam definisi konsepsional ini, penulis akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan diteliti, agar dapat diketahui jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian dan memudahkan berbagai pihak dalam menginterpretasikan mengenai konsep-konsep sesuai dengan lingkungan penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda mengenai konsep penelitian yang dirumuskan. Berdasarkan pendekatan teori yang berkenaan dengan variabel penelitian ini maka yang menjadi konsepsional variabel dapat di rumuskan sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada seluruh penduduk untuk peningkatan pendapatan pajak, yang dihasilkan melalui kegiatan pelaksanaan proses yang berdasarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak yang berlaku guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dapat diketahui secara obyektif kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda ditinjau dari kajian akademis. Oleh karena itu, dalam rangka pendalaman terhadap kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang meliputi:
 - a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013-2015.
2. Faktor penghambat dan pendukung Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti bagi *informan*. Dalam menentukan *Key informan* dan *informan* dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* Seperti yang telah dikemukakan Sugiyono (2013: 53-54) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah *Key informan* yaitu Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Sedangkan *Informan* yaitu beberapa staff Dinas Pendapatan Daerah dan pegawai di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
- b. Sumber data sekunder meliputi buku literatur, jurnal, tulisan-tulisan serta dokumen-dokumen data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Library Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini.
2. Penelitian Dokumen (*Documant Research*), adalah untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder maka penulis memperolehnya dengan jalan mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan yang ada dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
3. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilaporkan terhadap objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) untuk menganalisis data

hasil penelitian. Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian-penyajian membantu memahami apa yang sedang terjadi untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang mendalam. Sebagaimana kondensasi data, penciptaan dan penggunaan penyajian tidak terpisah dari analisis karena penyajian data merupakan bagian dari analisis.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Drawing/Verification Conclusion*)

Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal dan proposisi. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis.

Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau dapat pula tidak dicari dan digabungkan dengan argumen pendek dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

4.1.1 Kondisi Geografis dan Luas Wilayah Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta salah satu kota terbesar di Kalimantan. Seluruh wilayah kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut dan udara. Dengan sungai mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda, yang menjadi "gerbang" menuju pedalaman Kalimantan Timur. Kota ini memiliki luas wilayah 718 kilometer persegi dan berpenduduk 805.688 jiwa pada tahun 201, menjadikan kota ini berpenduduk terbesar di seluruh Kalimantan.

Secara geografis Kota Samarinda terletak $0^{\circ} 19' 02''$ – $0^{\circ} 42' 31''$ Lintang Utara dan $117^{\circ} 03' 00''$ – $117^{\circ} 18' 14''$ Bujur Timur dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Bumi dan bangunan Kota Samarinda (Julaiha)

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Anggana dan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan
: Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Sebelah Selatan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km persegi yang terbagi secara administratif menjadi 10 Kecamatan, yakni Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Kecamatan hasil pemekaran yakni Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Loa Janan Ilir.

4.3.1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah (Nurmantu, 2003:5). Menurut Partanto (2001:78) mendefinisikan kontribusi adalah uang atau iuran atau kepada perkumpulan dan sebagainya.

Jadi, yang dimaksudkan dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan atau iuran yang diperoleh dari pajak bumi dan bangunan melalui pemungutan pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dari hasil perhitungan selama 3 (tiga) tahun rata-rata 1,17 %, dengan kenaikan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2013 dan 2014 dikarenakan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan pendapatan pajak bumi dan bangunan dengan melakukan upaya sosialisasi dan melakukan penagihan kepada wajib pajak dan pada tahun 2015 dengan penurunan penerimaan pajak disebabkan karena perencanaan target yang ditetapkan lebih besar daripada sebelumnya dan disebabkan juga oleh

kondisi keuangan pembiayaan yang tidak stabil, dikarenakan dana bagi hasil yang seharusnya untuk penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan jadi terpakai untuk kebutuhan operasional yang lain. Dengan hal ini menunjukkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria Interpretasi Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah masih relatif kecil atau dengan persentase rasio rata-rata sebesar 1,17% dengan kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

4.3.1.1 Objek Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun.

Berdasarkan data yang ada dilapangan Kota Samarinda, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nimor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan menjadi objek pajak bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

4.3.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB (2013-2015)

Dari data yang disajikan penulis mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan pada tahun anggaran 2013-2015 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Samarinda dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Adapun target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Samarinda tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015, anggaran tahun 2013 dengan target Rp. 27.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.774.102.069,74 atau dengan pencapaian sebesar 101,00 %, pada tahun anggaran 2014 dengan target Rp. 30.000.000.000,- berhasil terealisasi sebesar Rp. 37.812.061.637,- atau mencapai peningkatan dengan pencapaian sebesar 126,04 %, dan pada tahun anggaran 2015 jumlah penerimaan penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan yang ditargetkan sebesar Rp. 35.000.000.000,- dengan realisasi yang diperoleh Rp. 33.336.301.098,32 atau mengalami penurunan dengan perentase sebesar 95,25 %.

Pada tahun 2013 dan 2014 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dan melebihi target yang dianggarkan dikarenakan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan wewenang daerah untuk memaksimalkan pendapatan pajak bumi dan bangunan dengan melakukan upaya sosialisasi dan melakukan penagihan kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk melunasi pembayaran pajak bumi dan

bangunan. Pada tahun 2015 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan, penurunan ini disebabkan karena perencanaan target yang ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya dan disebabkan juga oleh kondisi keuangan yang tidak stabil, dikarenakan dana bagi hasil yang seharusnya untuk penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan jadi terpakai untuk kebutuhan yang lain.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Faktor penghambat disini yaitu dimana suatu hal yang menjadi penghambat dalam kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor yang menjadi penghambat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat

Setelah penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda masih banyak terdapat masyarakat yang kurang sadar dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga pajak bumi dan bangunan tidak teralisasi dengan baik.

2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan Dinas Pendapatan Daerah masih kekurangan jumlah staf pegawai atau petugas pajak. Sehingga berakibat tidak optimalnya pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam pelaksanaannya. Akurasi dan Validitas Database

Pasca pelimpahan pajak bumi dan bangunan kepada daerah, data mengenai informasi pajak sebelumnya diperoleh Dinas Pendapatan Daerah dari pihak pusat, akibat banyak terjadi perubahan seiring berjalannya waktu maka ada banyak jumlah data pajak yang ada saat ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Akibat dari permasalahan ini maka menjadi penghambat pemasukan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah karena akurasi dan validitas database pajak yang tidak sesuai.

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan pajak bumi dan bangunan, masih banyak ditemukan data dobel atau tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. kemudian ada objek pajak tanpa keterangan atau tidak jelas siapa kepemilikannya.

Kemudian yang menjadi faktor pendukung disini adalah berkembangnya teknologi dan komunikasi membantu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam hal sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta juga pihak Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Kaltim dalam prasarana pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda bagi masyarakat yang mempunyai tempat tinggal jauh tidak perlu lagi datang ke

Kantor Dinas Pendapatan Daerah cukup membayar melalui ATM Bank Kaltim ataupun datang ke Kantor Cabang Bank Kaltim terdekat sehingga dapat mempermudah bagi masyarakat yang ingin membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat peneliti baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi atau melalui dokumen-dokumen yang memperkuat proses penyimpulan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan skripsi ini yang berjudul “Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda” yaitu sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dari hasil Perhitungan selama 3 (tiga) tahun rata-rata 1,17 %, hal ini menunjukkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria Interpretasi Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah masih relatif kecil atau dengan persentase rasio rata-rata yaitu sebesar 1,17% dengan kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Faktor penghambat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, selain itu, masih kurangnya jumlah tenaga pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang melakukan pendataan objek pajak, dan lemahnya sistem akurasi dan validitas database dari Dinas Pendapatan Daerah akibat pasca pelimpahan dari pusat ke daerah, yaitu banyak ditemukan data pajak yang dobel atau tidak sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Faktor pendukung Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berkembangnya teknologi dan juga komunikasi membantu pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam hal sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta juga pihak Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Kaltim dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menganalisa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya secara cepat dan akurat. Kemudian objek pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota

Samarinda di data ulang kembali dengan pendataan langsung ke lapangan, agar data objek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Dalam hal ini pihak Dispenda Kota Samarinda selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak adalah untuk kemajuan pembangunan daerah.
3. Perlu adanya penambahan petugas pelaksana pajak, itu artinya menambah jumlah sumber daya manusia guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan yang menghasilkan penerimaan pajak bumi dan bangunan secara optimal dalam meningkatkan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Untuk kedepannya masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran dan serta tanggung jawab mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin dan selalu tepat waktu setiap tahunnya karena dengan membayar pajak secara rutin masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Bunga Rampai.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Andrian, Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode penelitian*. Bandung: Andi Offest.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offest
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. 1992. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismawan, Indra. 2000. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Kurniawan, Panca. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi ketiga. Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir. 2005. *Pokok-pokok Perpajakan*. Jakarta: Liberty.
- Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Safri, Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemitro, Rochmat & Muttaqin, Zainal. 2001. *Pajak Bumi & Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Damayanti, Theresia W. 2009. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offest
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja. HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.

Yani Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2012 *Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.